



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Implementasi penggunaan *Sistem Online Single Submission* (OSS) Pada Pelayanan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang.

Pelaksanaan Sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang. Proses perizinan diawali dengan mengunjungi <https://oss.go.id/>, Pilih MASUK, masukkan Username dan Password, lalu klik tombol MASUK, Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru, Lengkapi Data Pelaku Usaha, Lengkapi Data Bidang Usaha, Lengkapi Data Detail Bidang Usaha, Lengkapi Data Produk/Jasa, Periksa Daftar Usaha, Periksa Daftar Kegiatan Usaha, Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu), Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri, Periksa Draf Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha terbit (SS/Izin belum terverifikasi).

2. Kendala dalam penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang.

Kendala yang ditemui dalam penerapan OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kondisi sosial masyarakat khususnya pelaku usaha belum sepenuhnya mampu mengoperasikan sistem perizinan berbasis OSS.
  2. Tidak semua pelaku usaha memiliki perangkat yang memadai untuk digunakan mendaftar pada website.
  3. Website sedang tidak bisa diakses atau sedang dalam *maintenance* yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat log-in atau terjadi *error*.
3. Upaya dalam mengatasi kendala pada penerapan sistem Online Single Submission (OSS) Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang.

Beberapa upaya yang dilakukan pihak DPMPTSP Kota Padang agar implementasi kebijakan perizinan berbasis OSS dapat maksimal yaitu dengan cara:

1. DPMPTSP melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
2. DPMPTSP menyediakan layanan pengaduan untuk membantu pelaku usaha yang terkendala.
3. Perbaikan dan pengembangan sistem.

## **B. Saran**

1. Perlunya peningkatan dan pengembangan akan fasilitas maupun aplikasi agar penggunaan *Online Single Submission* (OSS) dapat lebih mudah dan optimal.
2. Perlunya peningkatan sosialisasi mengenai Sistem *Online Single Submission* (OSS) agar masyarakat mengerti dan mampu mengoperasikan Sistem (OSS) agar lebih merata.

3. Masyarakat khusus bagi para pelaku usaha agar mau membaca dan mencari berita dan informasi yang telah disampaikan oleh pihak DPMPTSP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Achmad Nurmandi, 2018, *Pelayanan Sektor Publik*. Umy Press, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Winarno, 2008, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Koesrianti dkk, 2019, “*Pedoman Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*”, Zifatama Jawara, Sidoarjo.
- Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*. Kencana, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2014, *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Lukman Offset YPAPL, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

### C. Sumber Lain

- Adithya Syahfitra, 2020, ‘Peran Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission (Oss) Dalam Memberikan Pelayanan Yang Cepat’ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara.

- Assegaf dkk, 2019, 'Pelaksanaan *Online Single Submission*(OSS) Dalam Rangka percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Jawa Tengah', *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.8, No.2
- Alvianus Oktariadi, 2023, 'Pelayanan Publik Sektor Perizinan Berbasis Online Single Submission Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta', Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.
- Dayantri, 2022, 'Implementasi Kebijakan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Sumatera Utara', *Sibatik Journal*, Vol. 1 No.5
- Sanjaya, Jexingly (2023) 'Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Dalam Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung', Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Mulya Putra, 2022, 'Pelaksanaan Pendampingan *Online Single Sub Mission* (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu', *Ranah Research*, Vol.4, No.2
- Nofriadi Marpaung, 2023, 'Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Kota Padang Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan', Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang
- Rima Kurniati, 2021, Perizinan di Kota Padang Berbasis Risiko Lewat Sistem OSS, 2 Juni 2021, <https://padang.tribunnews.com/2021/06/02/mulai-2-juli-2021-perizinan-di-kota-padang-berbasis-risiko-lewat-sistem-oss>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, UU Cipta Kerja Beri Kepastian dan Penegakan Hukum dalam Proses Perizinan Berusaha, Jakarta, 23 Desember 2020, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/735/uu-cipta-kerja-beri-kepastian-dan-penegakan-hukum-dalam-proses-perizinan-berusaha>.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Hukum Tak Lekang dengan Teknologi", <https://law.ui.ac.id/hukum-tak-lekang-dengan-teknologi/>, dikunjungi pada tanggal 4 Januari 2024.

